

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
1.	Tersedianya sistem layanan investasi yang kondusif	1 Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perijinan	82,19 Nilai	DPMPTSP
2.	Meningkatnya nilai investasi	2 Nilai investasi	1.340.857.300.906 Rp	DPMPTSP
		3 Jumlah investor	983 Investor	DPMPTSP
3.	Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan,	4 Luasan RTH publik wilayah kota/ kawasan perkotaan	1.384.322 m2	DLH
		5 Persentase ketersediaan luasan RTH publik sebesar 20% dari luasan wilayah kota/ kawasan perkotaan	3,09 %	DLH
		6 Sumur resapan dan sejenisnya	1540 unit	DLH
		7 Cakupan pengelolaan sampah mandiri	2 desa/kel	DLH
4.	Meningkatnya aktivitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (<i>green economy</i>)	8 Prosentase aduan dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ditindak lanjuti	100 %	DLH
		9 Prosentase usaha/kegiatan yang ramah lingkungan	15 %	DLH
5.	Terpenuhinya infrastruktur dasar	10 Prosentase jaringan jalan dalam kondisi baik	73,84 %	DPUPR
		11 Panjang pembangunan jalan baru	5.000 m	DPUPR
		12 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik	86,98 %	DPUPR
		13 Drainase dalam kondisi baik	7.240 m	DPUPR
		14 Prosentase ketersediannya air baku	7,76 %	DPUPR
		15 Prosentase Penduduk yang terlayani penggunaan air baku	87 %	DPUPR
		16 Cakupan Penduduk Perkotaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	13,90 %	DPUPR
		17 Cakupan Penduduk Perdesaan yang mengakses Air Minum Layak dan berkelanjutan	76,98 %	DPUPR
6.	Terpenuhinya infrastruktur Penunjang	18 Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTR	85,59 %	DPUPR
		19 Cakupan wilayah yang telah mempunyai RDTR	89 %	DPUPR
		20 Penambahan titik lampu	2000 Titik lampu	DISHUB
		21 Terbangunnya sumber Energi Baru terbarukan	35 Unit	DLH
		22 Cakupan Ketersediaan sarpras lalu lintas dan perlengkapan jalan	100 %	DISHUB
		23 Cakupan ketersediaan kelengkapan layanan uji kelayakan kendaraan bermotor	100 %	DISHUB
		24 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,037 %	DISHUB
7.	Terpenuhinya infrastruktur sosial	25 Peringkat PORDA tingkat Provinsi	9 Peringkat	DISPORAPAR
		26 Bertambahnya Cabang Olahraga	1 Klub olahraga	DISPORAPAR
		27 Bertambahnya lapangan olahraga	3 Lapangan	DISPORAPAR
		28 Cakupan ketersediaan buku perpustakaan	72 %	DINAS ARPUS
		29 Cakupan pembinaan perpustakaan desa	10,55 %	DINAS ARPUS
		30 Cakupan layanan perpustakaan keliling	100 %	DINAS ARPUS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dan akuntabel	31 Dokumen Perencanaan (RKPD, RPJMD, RENSTRA PD dan RENJA PD)	Ada dokuman	BP3D
		32 Dokumen Evaluasi (Evaluasi RKPD dan RPJMD)	Ada dokuman	BP3D
		33 Dokumen Laporan Pertanggung jawaban (LKPJ, LPPD, ILPPD, LKPJAMJ, LPPD AMJ dan LKJIP)	Ada dokuman	SETDA
		34 Nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	65 skor	SETDA
		35 Persentase data/informasi dan kajian teknis pembangunan daerah yang dipublikasikan	100 %	BP3D
		36 Prosentase Peningkatan PAD	10,45 %	BKD
		37 Opini laporan keuangan daerah	WTP Opini	BKD
		38 Capaian Level Muturitas SPIP Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		39 Capaian Level Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Boyolali	3 level	INSPEKTORAT
		40 Menurunnya jumlah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan LKPD oleh BPK RI	27 temuan/ rekomendasi	INSPEKTORAT
9.	Terwujudnya pelayanan publik yang responsif dan akuntabel	41 Tersusunnya kebijakan teknis bidang administrasi kewilayahan	5 dokuman	SETDA
		42 Tersusunnya kebijakan teknis bidang kelembagaan	5 dokuman	SETDA
		43 Nilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	64 skor	SETDA
		44 Prosentase Aparatur Sipil Negara menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	82 %	BKP2D
		45 Prosentase tingkat ketaatan Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan kepegawaian.	100 %	BKP2D
		46 Persentase produk hukum/regulasi daerah yang dihasilkan berdasarkan prolegda	74 %	SETDA
		47 Rumusan kebijakan teknis pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesra dan administasi	62 dokuman	SETDA
		48 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat/ Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Boyolali	79,5 skor	SETDA
		49 Persentase kerjasama (MoU, Peraturan Bersama, PKS/ Agreement) yang difasilitasi dan dikoordinasikan hingga program aksi	90 %	SETDA
		50 Prosentase pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	DISPENDUKCAPIL
		51 Cakupan Kecamatan yang melaksanakan pencetakan KTP-EL	100 %	DISPENDUKCAPIL
		52 Terlaksananya fasilitasi layanan persandian	100 %	DISKOMINFO
		53 Kualitas layanan e-procurement	80,00 skor	SETDA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		54 Kebijakan teknis di bidang pemberitaan, pengumpulan dan distribusi informasi, dan protokol yang dihasilkan	7 Media	DISKOMINFO, SETDA
		55 Dokumen statistik daerah yang dipublikasikan	7 dokuman	DISKOMINFO
		56 Cakupan hasil penelitian dan inovasi daerah yang diimplementasikan (%)	75 %	BP3D
		57 Prosentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	100 %	DINAS ARPUS
		58 Cakupan Pengelolaan arsip daerah	50 %	DINAS ARPUS
		59 Prosentase sanggahan lelang	4,8 %	SETDA
		60 Terlaksananya layanan fasilitasi DPRD Dalam melaksanakan fungsinya yaitu Legislatif, Penganggaran dan Pengawasan	100 %	SEKRETARIAT DPRD
		61 Cakupan permasalahan pertanahan yang diselesaikan	62 %	DPUPR
10.	Masyarakat yang tertib, aman, dan mendapat perlindungan jaminan kesejahteraan sosial	62 Cakupan konflik antar kelompok masyarakat yang ditangani	71,43 %	KANKESBANGPOL
		63 Prosentase penurunan jumlah kejadian kriminalitas	87 %	SATPOL PP
		64 Prosentase penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) di kabupaten.	90 %	SATPOL PP
		65 Prosentase penyelesaian pelanggaran perda di kabupaten.	97,56 %	SATPOL PP
		66 Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	80 %	KANKESBANGPOL
		67 Cakupan sosialisasi/ fasilitasi wawasan kebangsaan pada sekolah setingkat SLTA	76,74 %	KANKESBANGPOL
		68 Indeks Resiko Bencana	100 %	BPBD
		69 Cakupan kebakaran yang tertangani	74 %	SATPOL PP
		70 Cakupan penanganan PMKS	35,77 %	DINSOS
		71 Perusahaan yang menggaji sesuai dengan regulasi	70 perusahaan	DISKOPNAKER
		72 Tingkat penyerapan tenaga kerja	37,2 %	DISKOPNAKER
		73 Tenaga kerja yang meningkat kompetensinya	240 orang	DISKOPNAKER
		74 Rasio rumah layak huni	87 %	DPKP
		75 Penanganan Lingkungan pemukiman kumuh	1,65 Ha	DPKP
		76 Cakupan desa yang memiliki kelompok Tribina Aktif (BKB, BKR, dan BKL)	63 %	DP2KBP3A
		77 Cakupan Peserta KB.	77 %	DP2KBP3A
		78 Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun.	1,6 %	DP2KBP3A
		79 Cakupan Kelompok KRR (kesehatan reproduksi remaja) yang Aktif.	56,63 %	DP2KBP3A
		80 Cakupan desa yang memiliki kelompok Posdaya Aktif.	16 %	DP2KBP3A
		81 Cakupan Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi	57 %	DP2KBP3A
		82 Desa layak anak	28 desa	DP2KBP3A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
11.	Meningkatnya kemampuan produktivitas dan daya saing masyarakat, serta menurunnya ketimpangan pendapatan	83 UMKM yang dibina yang meningkat usahanya/ omzetnya	30 UMKM	DISKOPNAKER
		84 Koperasi yang dibina yang meningkat nilai kesehatannya	50 koperasi	DISKOPNAKER
		85 Cakupan penyaluran permodalan kepada Koperasi dan UMKM	54 %	DISKOPNAKER
		86 Kelompok binaan PKK	287 kelompok	DISPERMASDES
		87 Jumlah LSM	267 lembaga	DISPERMASDES
		88 Jumlah PKK aktif	287 kelompok	DISPERMASDES
		89 Posyandu aktif	1407 unit	DISPERMASDES
		90 Cakupan Kinerja SDM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (LPMD/K) Yang aktif	67 %	DISPERMASDES
		91 Meningkatnya kemampuan lembaga pengelola sarana air baku dan air bersih bagi masyarakat	201 lembaga	DISPERMASDES
12.	Meningkatnya Derajat kesehatan	92 Penurunan Angka Kematian Bayi	8,4 per 1000 kh	DINKES
		93 Kasus Kematian Ibu	20 kasus	DINKES
		94 Penurunan Angka Kematian Balita	11 per 1000	DINKES
		95 Cakupan kunjungan bayi	87 %	DINKES
		96 Cakupan pelayanan anak balita	94 %	DINKES
		97 Prosentase puskesmas melaksanakan pelayanan Lansia	100 %	DINKES
		98 Prosentase Balita kurus yang mendapat makanan tambahan	90 %	DINKES
		99 Cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin	39,2 %	DINKES
		100 Prosentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	96 %	DINKES
		101 Proporsi pembinaan dan pengawasan pelayanan kefarmasian	40 %	DINKES
		102 Proporsi pembinaan dan pengawasan Produksi dan distribusi makanan dan minuman	40 %	DINKES
		103 Angka kesakitan DBD (Insiden rate/IR) < 50/100.000 penduduk	48,5 per 100.000	DINKES
		104 Angka kematian DBD (CFR)	1,7 % dari jumlah penderita	DINKES
		105 Prosentase jumlah orang yang dites HIV dan menerima hasil	30 %	DINKES
		106 Angka keberhasilan pengobatan TB yang terkonfirmasi ≥85%	> 75 %	DINKES
		107 Persentase desa/kel. yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM	40 %	DINKES
		108 Cakupan Desa UCI	100 %	DINKES
		109 Puskesmas Terakreditasi	6 puskesmas	DINKES
		110 Cakupan Rawat Jalan (puskesmas)	15 %	DINKES
		111 Cakupan Rawat Inap (puskesmas)	1,5 %	DINKES
		112 Cakupan respon aduan kegawat daruratan kesehatan yang ditangani	90 %	DINKES
		113 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Masyarakat)	100 %	DINKES
		114 Cakupan SPM di Puskesmas (Upaya Kesehatan Perorangan)	100 %	DINKES
		115 Cakupan Puskesmas Memenuhi Standar Pemenkes	13,79 %	DINKES
		116 Rasio dokter	16,0 %	DINKES
		117 Rasio dokter gigi	5,1 %	DINKES

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		118 Rasio perawat	95,3 %	DINKES
		119 Rasio bidan	57 %	DINKES
		120 Prosentase puskesmas melaksanakan simpus terintegrasi	60 %	DINKES
		121 Cakupan Desa/ Kelurahan Siaga Aktif Mandiri	93 desa	DINKES
		122 Proporsi Rumah tangga sehat	73 %	DINKES
		123 Cakupan Desa STBM	160 desa	DINKES
		124 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Pandan Arang	99,46 %	RSUD PANDAN ARANG
		125 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Simo	79,23 %	RSUD SIMO
		126 Cakupan pelayanan rumah sakit RSUD Waras Wiris	81 %	RSUD WARAS WIRIS
13.	Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk	127 APK PAUD	79,87 %	DISDIKBUD
		128 APK SD	101,00 %	DISDIKBUD
		129 APK SMP	97,60 %	DISDIKBUD
		130 APM SD	86,50 %	DISDIKBUD
		131 APM SMP	71,50 %	DISDIKBUD
		132 Angka Putus Sekolah SD	0,03 %	DISDIKBUD
		133 Angka Putus Sekolah SMP	0,20 %	DISDIKBUD
		134 Angka Melanjutkan SD ke SMP	99,15 %	DISDIKBUD
		135 Persentase Ruang Kelas SD kondisi baik	94,22 %	DISDIKBUD
		136 Persentase Ruang Kelas SMP kondisi baik	98,10 %	DISDIKBUD
		137 Persentase guru SD bersertifikat pendidik	56,14 %	DISDIKBUD
		138 Persentase guru SMP bersertifikat pendidik	67,95 %	DISDIKBUD
		139 Rasio Siswa terhadap Guru SD	18,25 orang	DISDIKBUD
		140 Rasio Siswa terhadap Guru SMP	19,25 orang	DISDIKBUD
		141 Presentase Buta Aksara > 15 tahun	0,26 %	DISDIKBUD
		142 Presentase SD Berakreditasi minimal B	92,50 %	DISDIKBUD
		143 Presentase SMP berakreditasi minimal B	82,50 %	DISDIKBUD
14.	Meningkatnya daya saing industri	144 IKM yang difasilitasi/dibina dan meningkat hasil produksinya	386 IKM	DISDAGPERIN
		145 Pembentukan kawasan peruntukkan industri	0 kawasan	DISDAGPERIN
		146 Pertumbuhan industri	9338 unit	DISDAGPERIN
15.	Meningkatnya daya saing perdagangan	147 Sarpras perdagangan yang representatif (toko, kios, los, kantor, MCK, TPS, mushola, dll).	85 unit	DISDAGPERIN
		148 Cakupan lokasi pedagang pasar, PKL dan Asongan yang tertib dan tertata	67 %	DISDAGPERIN
		149 Pelaku usaha dan konsumen yang difasilitasi pemerintah daerah dalam rangka perlindungan konsumen	4.200 pelaku usaha	DISDAGPERIN
		150 Pendapatan retribusi pasar daerah yang dikelola Pemkab Boyolali	5.139.335 Rp.	DISDAGPERIN
		151 Nilai ekspor barang (USD)	150.491 US \$	DISDAGPERIN
		152 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Hb (%)	14,00 %	DISDAGPERIN
16.	Meningkatnya produksi bahan pangan untuk berkontribusi pada pasar nasional	153 Produksi pangan utama (Ton) : Padi	292.987 ton	DISPERTAN
		Produktivitas bahan pangan utama lainnya per hektar:		DISPERTAN
		154 - Jagung	137.082 ton	DISPERTAN
		155 - Kedelai	6.829 ton	DISPERTAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	2	3	4	5
		Produksi tanaman hortikultura utama		DISPERTAN
		156 - Pepaya	123.636 kuintal	DISPERTAN
		157 - Cabe	113.333 kuintal	DISPERTAN
		158 - Bawang Merah	30.909 kuintal	DISPERTAN
		159 - Jahe	10.561 kuintal	DISPERTAN
		160 - Kencur	17.000 kuintal	DISPERTAN
		Jumlah produksi tanaman perkebunan :		DISPERTAN
		161 - Cengkeh	347 ton	DISPERTAN
		162 - Kopi	139 ton	DISPERTAN
		163 - Kelapa	5.054 ton	DISPERTAN
		164 - Tembakau	4.747,42 ton	DISPERTAN
		165 - Tebu	32.877 ton	DISPERTAN
		166 - Lada	21,99 ton	DISPERTAN
		167 - Atsiri	54,41 Kuintal	DISPERTAN
		168 Persentase desa yang memiliki Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD)	23,22 %	DKP
		169 Meningkatnya Cadangan Pangan	97 %	DKP
		170 Skor Pola Pangan Harapan	90 skor	DKP
17.	Meningkatnya produksi ternak dan pengolahan hasil ternak untuk berkontribusi pada pasar nasional	171 Produksi ikan	30.478 ton	DISNAKKAN
		Produksi hasil peternakan		DISNAKKAN
		172 - Produksi daging	8.345,00 ton	DISNAKKAN
		173 - Produksi susu (kilo liter)	47.526,00 kilo liter	DISNAKKAN
		174 - Populasi ternak	316.181,00 ekor	DISNAKKAN
		175 - Sapi potong	88.650 ekor	DISNAKKAN
		176 - Sapi perah	88.010 ekor	DISNAKKAN
		177 - Kambing dan domba	139.521 ekor	DISNAKKAN
18.	Meningkatnya layanan pemerintah, aktivitas perekonomian dan popularitas potensi daerah yang berbasis teknologi informasi	178 Prosentase Perangkat Daerah yang mengembangkan aplikasi E-governance	65 %	DISKOMINFO
		179 Cakupan penyebaran informasi pembangunan daerah	91 %	DISKOMINFO
		180 Prosentase kelompok informasi masyarakat yang aktif	50 %	DISKOMINFO
19.	Meningkatnya popularitas daya tarik produk dan potensi daerah Boyolali	181 Kunjungan Wisatawan	445.875 orang	DISPORAPAR
		182 Meningkatnya PAD bidang Pariwisata.	1.450.000 Rp (.000)	DISPORAPAR
		183 Prosentase benda, situs dan kawasan budaya yang dilestarikan	96 %	DISDIKBUD

No	Program	Anggaran (Rp.)	Ket	Penanggung Jawab
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	546.787.250		DPMPTSP
2	Peningkatan Promosi Dan Kerja Sama Investasi	141.596.250		DPMPTSP
3	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	13.223.250		DPMPTSP
4	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.797.121.000	APBD dan DAK	DLH
5	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2.976.000.000		DLH
6	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	428.500.000		DLH
7	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250.000.000		DLH
8	Peningkatan Pengendalian Polusi	615.000.000	APBD dan DAK	DLH
9	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	27.999.404.000		DLH
10	Pembangunan Jalan dan Jembatan	140.240.583.000	APBD, DAK, Bankeu Provinsi, DBHCHT dan DID	DPUPR
11	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	3.325.000.000		DPUPR
12	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	2.845.000.000		DPUPR
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	19.407.821.000	APBD dan DAK	DPUPR
14	Pengembangan Sistem Informasi pertanahan	136.820.000		DPUPR
15	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	11.551.203.000	APBD dan DAK	DPUPR
16	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	6.085.135.000	APBD dan DAK	DPUPR

17	Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumberdaya Air Lainnya	26.833.000.000		DPUPR
18	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1.300.000.000		DPUPR
19	Pengawasan Jasa Konstruksi	106.411.000		DPUPR
20	Perencanaan Tata Ruang	733.503.500		DPUPR
21	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	26.940.000		DPUPR
22	Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	165.000.000		Dishub
23	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	185.000.000		Dishub
24	Peningkatan Pelayanan Angkutan	107.580.000		Dishub
25	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	300.000.000		Dishub
26	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.374.365.000		Dishub
27	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	320.000.000		Dishub
28	Pengembangan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	5.964.321.000		Dishub
29	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	292.750.000		Disporapar
30	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1.063.000.000		Disporapar
31	Pengembangan Destinasi Pariwisata	5.022.021.000	DAK dan APBD	Disporapar
32	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	287.250.000		Disporapar
33	Pengembangan Kemitraan	757.038.000	DAK dan APBD	Disporapar
34	Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	790.000.000		Disporapar
35	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	16.175.000.000		Disporapar
36	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	205.750.000		Dinas Arpus
37	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	128.281.000		Dinas Arpus
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	27.000.000		Dinas Arpus
39	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	36.250.000		Dinas Arpus
40	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	3.073.080.500		Dinas Arpus
41	Penelitian dan Pengembangan Daerah	491.032.000		BP3D
42	Pengembangan Data/Informasi	348.700.000		BP3D
43	Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	95.750.000		BP3D
44	Kerjasama Pembangunan	210.000.000		BP3D
45	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	90.000.000		BP3D
46	Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	175.000.000		BP3D
47	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000		BP3D
48	Perencanaan Pembangunan Daerah	726.013.000		BP3D
49	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	293.433.000		BP3D
50	Perencanaan Sosial dan Budaya	35.099.000		BP3D
51	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	50.625.000		BP3D
52	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	45.000.000		BP3D
53	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	4.775.000		Sekretariat Daerah
54	Pengembangan data/informasi	72.000.000		Sekretariat Daerah
55	Pengembangan wilayah transmigrasi	1.500.000		Sekretariat Daerah
56	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	108.500.000		Sekretariat Daerah
57	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	210.600.000		Sekretariat Daerah
58	Kerjasama Pembangunan	227.926.250		Sekretariat Daerah
59	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	96.750.000		Sekretariat Daerah
60	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	15.000.000		Sekretariat Daerah
61	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	161.600.000		Sekretariat Daerah
62	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2.166.105.000		Sekretariat Daerah
63	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	666.950.000		Sekretariat Daerah
64	Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	150.000.000		Sekretariat Daerah
65	Kerjasama informasi dengan mas media	41.852.500		Sekretariat Daerah
66	Penataan Peraturan Perundang-undangan	565.010.200		Sekretariat Daerah
67	Penataan Daerah Otonomi Baru	34.540.000		Sekretariat Daerah
68	Pendidikan politik masyarakat	35.985.000		Sekretariat Daerah
69	Peningkatan Pelayanan Publik	220.030.000		Sekretariat Daerah
70	Perencanaan Pembangunan Daerah	328.007.750		Sekretariat Daerah
71	Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	646.489.600		Sekretariat Daerah
72	Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	20.170.000		Sekretariat Daerah
73	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	92.865.000		BKD
74	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.321.408.700		BKD

75	Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	13.141.000		BKD
76	Pengendalian Kerugian Daerah	21.350.000		BKD
77	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	787.154.000		Inspektorat
78	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	30.250.000		Inspektorat
79	Peningkatan Disiplin Aparatur	1.530.000.000		BKP2D
80	Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	234.046.250		BKP2D
81	Pendidikan Kedinasan	547.502.000		BKP2D
82	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	4.706.713.000		BKP2D
83	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.345.379.200		BKP2D
84	Penataan Administrasi Kependudukan	6.099.709.000		Dispendukcapil
85	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	10.337.900.000		Diskominfo
86	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	345.750.000		Diskominfo
87	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	128.090.000		Diskominfo
88	Kerjasama informasi dengan mas media	2.821.340.000		Diskominfo
89	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	24.887.593.653		Sekretariat DPRD
90	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	28.750.000		Kankesbangpol
91	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	806.065.000		Kankesbangpol
92	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	66.610.000		Kankesbangpol
93	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	23.540.000		Kankesbangpol
94	Pendidikan Politik Masyarakat	242.376.000		Kankesbangpol
95	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	2.154.285.000		Satpol PP
96	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	92.150.000		Satpol PP
97	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.411.750.000		Satpol PP
98	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	173.600.000		Satpol PP
99	Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	1.499.176.320		BPBD
100	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	515.547.500		Dinsos
101	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.368.892.900		Dinsos
102	Pembinaan Anak Terlantar	970.000.000		Dinsos
103	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	115.200.000		Dinsos
104	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	95.000.000		Dinsos
105	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	552.025.000		Dinsos
106	Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	44.000.000	DBHCHT dan APBD	Diskopnaker
107	Pengembangan Wilayah Trasmigrasi	121.300.000		Diskopnaker
108	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	1.789.932.000		Diskopnaker
109	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	393.050.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
110	Peningkatan Kesempatan Kerja	351.240.000		Diskopnaker
111	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	177.600.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
112	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	291.664.000		Diskopnaker
113	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	512.373.000	DBHCHT, DAK dan APBD	Diskopnaker
114	Pengembangan Perumahan	2.354.153.500		DPKP
115	Lingkungan Sehat Perumahan	25.000.000		DPKP
116	Pemberdayaan Komunitas Perumahan	57.930.000		DPKP
117	Bansos RTLH (lewat BKD)	11.313.000.000	DAK dan APBD	DPKP
118	Keluarga Berencana	6.027.148.000	DAK dan APBD	DP2KBP3A
119	Keserasian Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	5.000.000		
120	Kesehatan Reproduksi Remaja	110.865.000		DP2KBP3A
121	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	50.000.000		DP2KBP3A
122	Pelayanan Kontrasepsi	57.000.000		DP2KBP3A
123	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	17.000.000		DP2KBP3A
124	Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	110.000.000		DP2KBP3A
125	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	64.500.000		DP2KBP3A
126	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	35.265.000		DP2KBP3A
127	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	17.000.000		DP2KBP3A
128	Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	5.000.000		DP2KBP3A
129	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	620.720.000		DP2KBP3A

130	Peningkatan Informasi Kepedudukan dan KB	67.000.000		DP2KBP3A
131	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	628.228.450		Dispermasdes
132	Penataan Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	100.000.000		Dispermasdes
133	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	102.000.000		Dispermasdes
134	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	171.578.500		Dispermasdes
135	Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	307.486.704		Dispermasdes
136	Pembinaan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	6.482.165.200		Dispermasdes
137	Obat dan Perbekalan Kesehatan	7.754.168.000	APBD dan APBN	Dinkes
138	Upaya Kesehatan Masyarakat	20.768.750.000	APBD dan APBN	Dinkes
139	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	331.000.000	APBD dan APBN	Dinkes
140	Pengembangan Lingkungan Sehat	335.000.000	APBD dan APBN	Dinkes
141	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	470.000.000	APBN	Dinkes
142	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	4.751.408.000	APBD dan APBN	Dinkes
143	Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	8.891.000		Dinkes
144	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	2.936.000.000	APBD dan APBN	Dinkes
145	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	14.666.629.000		Dinkes
146	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	2.516.145.000	APBD dan APBN	Dinkes
147	Pengembangan Sumberdaya Kesehatan	167.086.000		Dinkes
148	Manajemen Informasi dan Regulasi Kesehatan	134.000.000		Dinkes
149	Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD	47.026.071.000		Dinkes
150	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	111.347.434.000		RSUD PA
151	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	3.840.000.000	DAK, Bankeu, dan DBHCHT	RSUD PA
152	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	15.441.047.000	BLUD	RSUD Simo
153	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	24.526.887.000	APBD dan DAK	RSUD Simo
154	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru - Paru/ Rumah Sakit Mata	11.805.719.000	DID dan DAK	RSUD Waras Wiris
155	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	5.028.000.000	Pajak Rokok	RSUD Waras Wiris
156	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD	11.642.353.000	BLUD	RSUD Waras Wiris
157	Pendidikan Anak Usia Dini	1.250.900.000	BOP PAUD dan DAK Non Fisik (APBN)	Disdikbud
158	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	125.265.618.000	BOS SD dan SMP, DAK SD, DAK SMP (APBN), dan Bankeu (APBD Prov)	Disdikbud
159	Pendidikan Non Formal	1.056.807.000	DAK SKB (APBN) dan APBD	Disdikbud
160	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.890.000.000		Disdikbud
161	Manajemen Pelayanan Pendidikan	3.941.716.000		Disdikbud
162	Pengembangan Nilai Budaya	2.398.000.000	DBHCHT (APBN) dan APBD	Disdikbud
163	Pengelolaan Kekayaan Budaya	719.435.000	DAK Non Fisik BOP Museum (APBN) dan APBD	Disdikbud
164	Pengelolaan Keragaman Budaya	2.239.169.700		Disdikbud
165	Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	61.500.000		Disdagperin
166	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	2.030.000.000	APBD, DAK dan DBHCHT	Disdagperin
167	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.274.180.000		Disdagperin
168	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	263.000.000		Disdagperin
169	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	110.200.000		Disdagperin
170	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	55.128.076.000	APBD dan DAK	Disdagperin
171	Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	104.105.000		Disdagperin
172	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana, dan Prasarana Daerah	75.000.000		Disdagperin
173	Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.064.376.000		Dispertan
174	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	256.075.000		Dispertan
175	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	259.000.000		Dispertan
176	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	8.386.200.000	APBD dan DAK	Dispertan
177	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	123.150.000		Dispertan

178	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1.815.363.000		Dispertan
179	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	3.017.393.000	APBN	Dispertan
180	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hasil Tanaman Pangan	42.200.000	APBN	Dispertan
181	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura	887.900.000	APBN	Dispertan
182	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	1.720.500.000	DAK dan APBD	DKP
183	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	462.055.000		Disnakkan
184	Pengembangan Budidaya Perikanan	1.664.873.000	DAK KKP RI dan APBD	Disnakkan
185	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.037.247.000	DAK Pertanian dan APBD	Disnakkan
186	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	959.639.000	DAK Pertanian dan APBD	Disnakkan
187	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	60.557.000		Disnakkan

Boyolali, 1 Agustus 2019

BUPATI BOYOLALI



Drs. SENO SAMODRO